

**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Oleh

HANRIANI

NIM 105720555915



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Oleh

HANRIANI

NIM 105720555915



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.


Nama Mahasiswa : Hannani
No Stambuk/NIM : 105720555915
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2019.

Makassar, 22 Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I


Hi. Naidah, SE., M.Si
NIDN: 0010026403

Pembimbing II


Andi Risfan Rizaldi, SE, MM
NIDN: 0918058602

Mengetahui

Dekan


Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Israh Resulung, S.E., M.M
NBM: 903078

Ketua

Prodi Studi Manajemen


Muh. Nur Rasvid, S.E., M.M
NBM: 1085576



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Hanriani Nim : 105720555915, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019 M, Tanggal 23 Rabiul Awal 1440 H/ 22 Oktober 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Rabiul Awal 1440 H
22 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M. (Wd I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Andi Jam'an, SE., M.SI
 2. Sri Andyaningsih, SE, MM
 3. Andi Ristan Rizaldi, SE,MM
 4. M. Hidayat, SE,MM

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NIM. 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanriani
Stambuk : 105720555915
Program Studi : Manajemen
Dengan Judul : "Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019

Makassar, 22 Oktober 2019

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Imam Rasidong, S.E., M.M
NBM: 993078

Ketua
Jurusan Manajemen

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM: 1085576

ABTRAK

Hanriani, Tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Skripsi program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Hj. Naidah dan pembimbing II Andi Risfan Rizaldi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Kesuksesan pada Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan juga upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat optimal. Responden dalam penelitian sebanyak 3 orang yang terdiri dari staff anggaran, kepala bidang anggaran, dan juga kepala sub bagian keuangan.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dikatakan penggunaannya sudah optimal karena dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Perangkat Komputer, keamanan sistem, jaringan internet, akses informasi, efisiensi waktu dan juga SOP.

Kata Kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

ABSTRACT

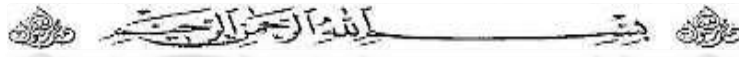
Hanriani, Tahun 2019 Use of Regional Financial Information Systems at the Regional Financial Management Agency. Thesis of management study program at the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by supervisor I Hj. Naidah and supervisor II Andi Risfan Rizaldi.

This study aims to determine the extent of the use of regional financial information systems (SIKD) at the Regional Financial Management Agency (BPKD), as well as find out what factors lead to success in the use of Regional Financial Information Systems (SIKD), and also what efforts alone must be done so that the use of regional financial information systems (SIKD) can be optimized. Respondents in the study were 3 people consisting of budget staff, head of the budget department, and also the head of the financial sub-section.

Data was collected through a process of direct interviews with respondents using interview guides, as well as study documentation of related documents. The results of the interviews and the data collected were analyzed using descriptive methods. The results of this study indicate that the use of the Regional Financial Information System at the Regional Financial Management Agency can be said to be optimal because it is influenced by various factors namely Human Resources (HR), Computer Devices, system security, internet networks, access to information, time efficiency and also SOUP.

Keywords: Use, Regional Financial Information System (SIKD)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkah rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntuhkan kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG”**, Penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan rumitnya objek pembahasan. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahim, SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak ismail rasulong, SE., MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Muh. Nur Rasyid, SE., MM Selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si. dan Bapak Andi Risfan Rizaldi, SE., MM. Selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbinganya, nasehatnya dan dukuganya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang.
6. Pimpinan serta pegawai badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Buat teman-teman Manajemen Man 15 i angkatan 2015 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
8. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada

lingkungan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya Aminn.

2019

Makassar,

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Konsep Dasar Sistem Informasi.....	4
1. Pengertian sistem informasi.....	4
B. Konsep Dasar Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	5
1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah	5
2. Landasan hukum Sistem Informasi Keuangan Daerah	6
3. Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah	8
4. Fungsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan.....	10
5. Kewajiban Daerah.....	11
6. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan	11

7. Strategi implementasi aplikasi SIKD	12
8. Faktor-faktor yang menyebabkan Kesuksesan pada penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	13
9. Upaya upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD	16
C. Tinjauan Empiris.....	16
D. Kerangka konsep.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Fokus Penelitian.....	21
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
D. Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Instrument Penelitian	24
G. Teknik Analisis	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B. Hasil Penelitian	34
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Informan.....	34
Tabel 4.2 : Jaringan Internet.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep.....	20
Gambar 4.2	Alur Rencana Kerja Anggaran (RKA)	35
Gambar 4.3	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).....	35
Gambar 4.4	Alur Surat Penyediaan Dana (SPD)	36
Gambar 4.5	Alur Surat Permintaan Pemabayaran (SPP)	37
Garbar 4.6	Alur Surat Perintah Membayar (SPM).....	37
Gambar 4.7	Alur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang

memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Faktor-Faktor yang menyebabkan Kesuksesan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu Sumber Daya Manusia, Perangkat Komputer, Estimasi Waktu, Akses Informasi, *Standar Operating Prosedur (SOP)* dan Upaya-upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. SIKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan

oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan permasalahan adalah Bagaimana Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah optimal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten Enrekang sudah optimal ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk.

1. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang Sistem Informasi Keuangan daerah dan bagaimana penggunaan sistem informasi tersebut, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan sistem informasi keuangan (SIKD).

2. Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagai referensi mengenai penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Sistem Informasi

1. Pengertian sistem informasi

Sistem informasi harus dilihat keterkaitan antara data dan informasi sebagai entitas penting pembentuk sistem informasi. Data merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apapun. Sementara informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Ada beberapa pendefinisian sistem informasi menurut para ahli dalam Muslihudin (2016) antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut *Yacub*, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi.
- b. Menurut *ida nuraida*, sistem informasi merupakan perangkat prosedur yang terorganisasi dengan sistematis, bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan.
- c. *Wing wahyu winarno*, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan dengan baik.

d. *Sutabri* mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Adapun tujuan sistem informasi yaitu menurut Fauzi R.A (2017):

- a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen
- b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
- c. Untuk mendukung suatu kegiatan perusahaan atau instansi.

B. Konsep dasar sistem informasi keuangan daerah

1. Pengertian sistem informasi keuangan daerah

Salah satu teknologi dan sistem yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah merupakan aplikasi yang dibangun oleh ditjen keuangan daerah dalam rangka percepatan transfer data dan efisien dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi sistem informasi keuangan daerah diolah oleh subdit informasi pengelolaan keuangan daerah pada direktorat pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban.

2. Landasan Hukum Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi pemerintah daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara daro presiden sebagian diserahkan kepada gubernur /bupati /wali/kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/wali/kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian. Prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan.

Dengan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang SIKD Diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercapai kepastian hukum

Adapun peraturan terkait sistem informasi keuangan Daerah, yaitu :

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. PP Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- c. PP Nomor 65 tahun 2010 Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informai Keuangan Daerah.
- d. PMK Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
- e. PMK Nomor 74 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Implementasi sistem informasi keuangan daerah di pemerintahan daerah diharapkan jalanya proses pelayanan publik. Implementasi SIKD akan membantu instansi pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* sebab sistem informasi keuangan daerah mampu memperbaiki hubungan antara agen dan principai melalui sistem informasi yang terintegrasi.

3. Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi sistem informasi keuangan daerah, maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan maupun pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Proses keuangan pada pemerintahan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, peranan SIKD adalah melakukan pemrosesan dan pengolahan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja pemerintah.

Menurut Rachim, A (2015) pemerintah pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah secara nasional dengan tujuan.

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan keuangan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.

- c. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah.
- e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
- f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam sistem informasi keuangan daerah secara nasional.

Ini menunjukkan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam sektor publik, dapat meningkatkan kinerja yang maksimal yang mengandung arti terjadinya peningkatan efisien, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi dan penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam perusahaan atau organisasi. Dengan meningkatnya tingkat efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan pada khususnya.

4. Fungsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Menurut Rachim, A. (2015) penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan standar informasi keuangan daerah
- b. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
- c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi

- d. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi pengembangan sistem informasi keuangan.
- e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi keuangan.
- f. Pembukuan sistem informasi keuangan daerah yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi, dan pertukaran informasi.
- g. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

5. Kewajiban Daerah

Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara terbuka melalui dokumentasi tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah dimaksud :

- a. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 januari tahun anggaran yang berkenaan.
- b. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berkenaan.
- c. Laporan realisasi apbd per semester pling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- d. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 agustus tahun berikutnya.
- e. Neraca daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya.
- f. Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 agustus tahun anggaran berikutnya.

- g. Data yang berkaitan dengan perhitungan dan perimbangan seperti data pegawai dan data lainya disampaikan paling lambat sesuai dengan surat pemerintaan Menteri Keuangan.

6. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi keuangan daerah (SIKD), maka penggunaanya diajukan kepada seuruh pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanakan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

- a. Wilayah I, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
- b. Wilayah II, yang meliputi sumatera selatan, jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan
- c. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat
- d. Wilayah IV, yang meliputi daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan Kantor regional di Provinsi Jawa Timur
- e. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan barat, Kalimantan tengah, Kalimantan selatan, Kalimantan timur, dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan
- f. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi selatan, Sulawesi tenggara, Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Sulawesi barat, Gorontalo, Maluku,

Maluku utara, papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Strategi Implementasi Aplikasi SIKD

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.

8. Faktor-faktor yang menyebabkan Kesuksesan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam proses optimalisasi penggunaan SIKD, erat kaitannya dengan ketersediaan SDM yang mendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, maka dari itu diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM.

b. Perangkat Komputer

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Sedangkan software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada computer. Dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah sangat dibutuhkannya kelengkapan hardware dan software dalam menunjang penggunaan SIKD.

c. Estimasi waktu

Adanya sistem informasi keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap estimasi waktu pada setiap pekerjaan yang dilakukan karena dapat mempermudah dan mengefisienkan waktu dalam penyusunan informasi keuangan daerah.

d. Akses informasi

Sistem informasi keuangan daerah memberikan layanan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dalam menyediakan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

e. *Standar Operating Procedures (SOP)*

Standar prosedur operasi menjadi aspek striktur yang penting dari setiap organisasi karena SOP menjadi pedoman bagi setiap pengguna aplikasi SIKD dalam bertindak.

f. Upaya upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD

Adapun upaya –upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten enrekang khususnya pada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD yaitu:

- a. Selalu menyesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada sistem SIKD
- b. Memberikan Pelayanan jaringan yang optimal dalam mendukung proses kerja pada SIKD

- c. Melatih dan membekali para pengguna sistem SIKD agar lebih mengetahui secara lebih jelas lagi terkait sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

C. Tinjauan Empiris

Amar, M.Y et al (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) SIPKD berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Pemda Kabupaten Tana Toraja. Disimpulkan bahwa persepsi kemanfaatan SIPKD, persepsi kemudahan penggunaan SIPKD, keahlian computer berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pegawai.

Atmaja, A.t et al (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dan Pengendalian intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM, penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Iriani, S, Suryono, M, dan Ambirowati, A (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan aplikasi SIPKD ditinjau dari factor-faktor yang diteliti menyebutkan bahwa ekspektasi kinerja,ekspektasi usaha, pengaruh social, Use Behaviour memiliki penerimaan yang baik terhadap penerimaan teknologi SIPKD, sedangkan *facilitating condition* memiliki spengaruh yang kurang terhadap penerimaan aplikasi SIPKD di Kabupaten Pacitan sehingga diperlukan pengkajian terhadap faktor ini.

Primasari, D (2017) melakukan peneliti dengan judul pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Keuangan terbukti berpengaruh terhadap kinerja. Adanya implementasi Sistem Informasi Keuangan akan membantu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas ini menjadi dasar para pegawai dalam pengambilan keputusan, khususnya pegawai tingkat atas serta dapat dijadikan alat ukur acuan kinerja.

Wartini, N.N dan Murjana, Y.I.G.W.(2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tergolong efektif. Untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dan survey kepuasan pengguna sistem informasi secara berkala sebagai bahan evaluasi dan

masukannya sehingga penyelenggara sistem informasi menjadi benar-benar efisien, ekonomis, efektif, dan akuntabel.

D. Kerangka Konsep

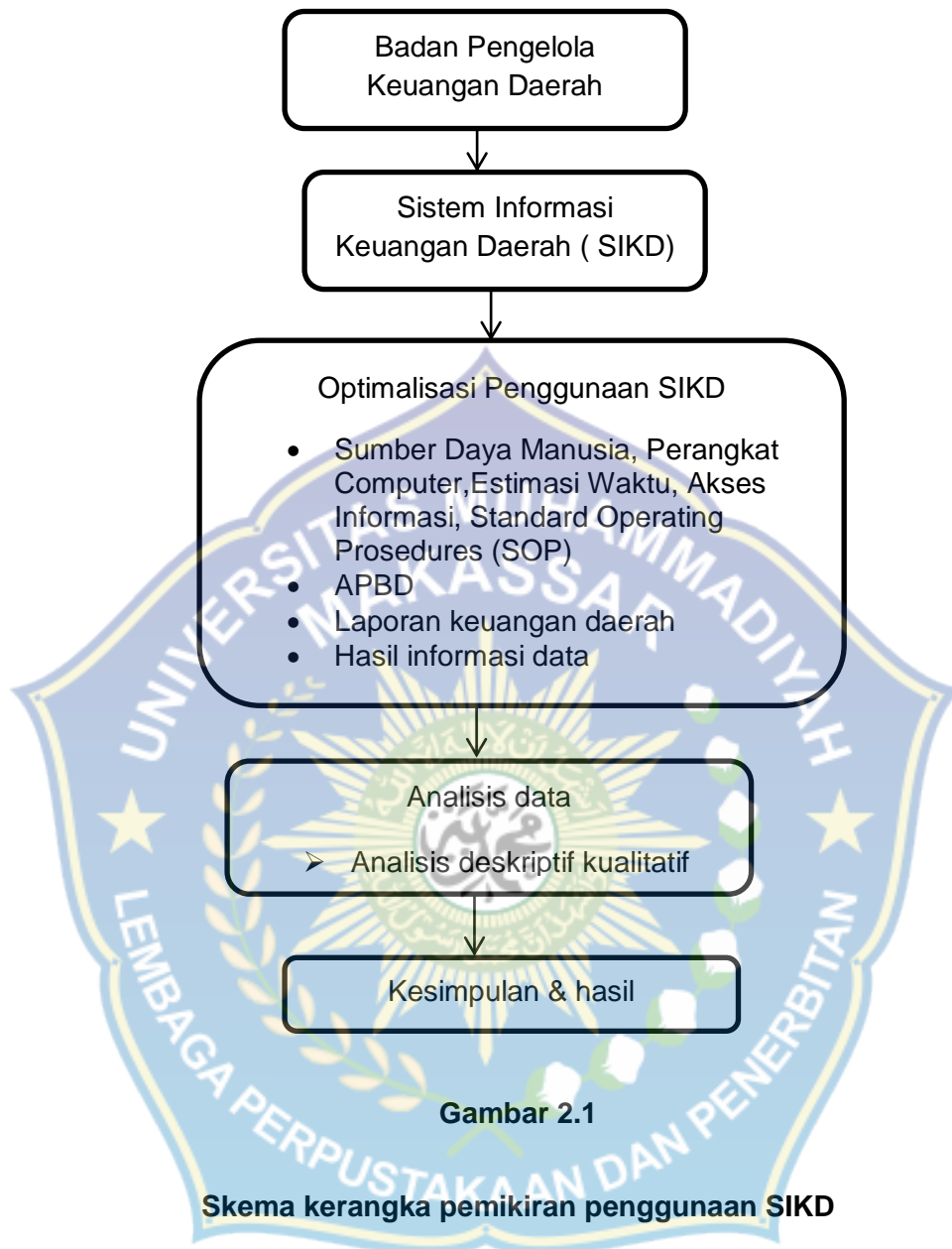
Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 merupakan proses yang mendukung dan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya. Maka dikeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah seperti yang tersebut diatas dibuatlah sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005.

Sistem Informasi keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi suatu instansi pemerintahan terutama bagi akuntan dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem informasi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan hasilnya nanti akan didistribusikan ke para pengguna. Salah satu tujuan sistem informasi keuangan daerah adalah untuk menunjang efektivitas penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam mengolah laporan keuangan, pimpinan memerlukan informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi perusahaan informasi yang dihasilkan harus merupakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya

untuk pengambilan keputusan serta informasi yang dihasilkan harus bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemakainya.

Penyajian laporan keuangan lebih efektif apabila dalam pelaksanaannya di dukung dengan sistem informasi yang memadai. Sistem informasi keuangan dapat memberikan informasi yang berguna manajemen dalam melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam mengefektifkan penyajian laporan keuangan. Selain dapat menunjang efektivitas penyajian laporan keuangan, sistem informasi keuangan juga dapat membantu kelancaran operasional suatu instansi apabila suatu instansi menggunakan sistem tersebut secara optimal.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah optimal ?

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No 1 Enrekang, Sulawesi selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang dari dua bulan yaitu bulan juli hingga Agustus 2019. Selain itu, lokasi tersebut dekat dengan wilayah peneliti, sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah yang ada dan memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan di Kabupaten Enrekang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni:

a. *Data primer*

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami terkait dengan SIKD. Untuk memperoleh data-data tersebut penelitian menggunakan 3 informan.

- Staf pegawai anggaran
- Kepala bidang anggaran
- Kepala bidang akuntansi dan pelaporan

b. *Data Sekunder*

Data sekunder merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini, data ini diperoleh dari informasi berupa buku, internet, literature lain atau data yang sudah ada seperti penelitian ekonomi tentang audit internal yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut.

1. Metode Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Sesuai dengan objek peneliti maka peneliti memilih observasi nonpartisipan. Observasi non partisipan dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

2. Metode Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan penulis dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan pimpinan dan para staf di Badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang berdasarkan fakta sesuai di lapangan untuk memperoleh data yang menunjang penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis sendiri yang bertindak sebagai instrument, ini didasari oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dinamis dan kemampuan untuk mengamati, meneliti, memutuskan dan menyimpulkan secara objektif.

Hasil penelitian yang valid serta dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, pensil/pulpen dan catatan peneliti yang berfungsi sebagai alat dokumentasi. Instrument peneliti yang digunakan adalah wawancara. Penggunaan metode wawancara digunakan karena peneliti ingin menggali informasi terkait Bagaimana Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Sudah Optimal.

G. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam memperoleh data ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah

analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan suatu sistem informasi keuangan khususnya pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik atau dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk pertanyaan dari uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif sebagai prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana data yang didapat berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini menggambarkan mengenai penggunaan sistem informasi laporan keuangan daerah pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BPKD

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999 di dukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pemerintah diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintah yang lebih responsive, transparansi dan akuntabel juga dipengaruhi oleh beberapa fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah.

Salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang di bentuk berdasarkan peraturan daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang. Lembaga ini berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya pengelolaan keuangan daerah lebih maksimal sehingga diperlukan menyusun rencana strategi dalam rangka perencanaan standar pelayanan minimal.

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekretaris Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan berdaya guna dan berhasil, maka perlu men 25 dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan keputusan Bupati Enrekang.

2. Visi dan Misi BPKD

a. Visi

Terwujudnya pengelola keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi dan akuntabel untuk gerakan membangun Enrekanng maju, aman dan sejahterah.

b. Misi

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya agar aparatur penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel



3. Struktur Organisasi dan job Description



b. Job Description

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang No. 21 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural, maka uraian tugas masing-masing jabatan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

1. Kepala BPKD

Merumuskan kebijakan di bidang keuangan dan asset dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Menatausahakan seluruh kegiatan operasional dinas pengelola keuangan dan asset daerah.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan RKA dan DPD dalam lingkup DPKAD kepada pemimpin.
- e. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran dalam lingkup DPKAD baik pembelanjannya, penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan.
- f. Menjamin bahwa seluruh perlengkapan dan as operasional DPKAD dari pencurian atau kehilangan.
- g. Menyetujui konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas dari pejabat dalam lingkup BPKD.
- h. Mempelajari menjelaskan setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang terkait dengan DPKAD dan mengusulkan untuk diterapkan.
- i. Menjamin pengadministrasian data-data kepegawaian dalam lingkup DPKAD.

- j. Memberikan pelayanan teknis terhadap bidang dilingkup DPKAD dalam pelaksanaan.
- k. Mengevaluasi hasil analisis jabatan dalam lingkungan DPKAD.
- l. Membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai DPKAD.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diperintahkan atasannya.

3. Kepala Bidang Anggaran

Menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan RKA dan perubahannya oleh tim anggaran eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan refisi APBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun DPA.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa dan meneliti bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
- e. Menjamin kebenaran bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), perubahan APBD dan nota keuangan.
- f. Memerintahkan dan melakukan perubahan RKA setiap unit kerja keputusan panitia anggaran eksekutif.
- g. Mempersiapkan bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja anggran (RKA) dan dokumen pengguna anggaran satuan kerja (DPA).

- h. Mempersiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan APBD dan nota keuangan.
 - i. Mencatat RKA yang diajukan oleh setiap unit kerja.
 - j. Mencatat perubahan RKA setiap unit kerja yang dilakukan oleh panitia anggaran eksekutif.
 - k. Membantu setiap unit kerja menyusun RKA dan DPd.
 - l. Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA.
 - m. Membuat SPD.
 - n. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - p. Melaksanakan tugas keninasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Bendahara
- Melakukan pembayaran, mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
 - b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
 - c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengeluarkan dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Membuat daftar penguji dan SP2D.
 - f. Bersama sub bidang akuntansi melakukan rekonsolidasi pencocokan saldo kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan.

- g. Memeriksa setiap surat keputusan berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan structural dan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, sistem honorarium, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penggajian dan honorarium.
 - h. Memyusun daftar gaji, honorarium, dan pajak penghasilan perorangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - i. Membuat daftar kekurangan gaji, tunjangan, dan uang duka sesuai aturan yang berlaku.
 - j. Membuat SP2D gaji.
 - k. Membuat SKPP pindah dan SKPP pensiun setiap pegawai.
 - l. Membuat keterangan pemungutan pajak perorangan kepada setiap pegawai pada setiap akhir tahun.
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - n. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
 - o. Membantu lelaahan staf kepada atasan.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
5. Kepala Bidang Verifikasi
- Memverifikasi penerimaan dan pengeluaran unit kerja sesuai DPA dan ketentuan yang berlaku.
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
 - b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
 - c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

- e. Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA.
 - f. Memeriksa dan mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
 - g. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.
 - h. Menyiapkan informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan atasan.
 - i. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan sesuai kebutuhan atasan.
 - j. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
 - k. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya..
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Bidang Akuntansi

Melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah diotorisasi dengan menggunakan sistem pembukuan sesuai ketentuan dan membuat laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD dalam satu tahun anggaran.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

- d. Membukukan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
- e. Mempersiapkan semua bukti keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyusun konsep laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD.
- g. Bersama bendaharawan umum daerah melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi keuangan daerah.
- h. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
- i. Menyiapkan data dan informasi keuangan kepada badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
- j. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- k. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Hasil penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka sub ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf pengelolaan keuangan yang terdiri dari staf anggaran, kepala bidang anggaran, dan juga kepala bidang akuntansi dan pelaporan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan maka dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1 Data Informan

NO	Nama Responden	Jenis Kelamin	Jabatan
1	MUKMIN IBRAHIM	P	Kepala Sub Bagian Keuangan

2	PERMADI HASAN	L	Kepala Bidang Anggaran
3	NURHAMA	P	Staff anggaran

Dari hasil wawancara tersebut maka selanjutnya dilakukan pemahaamn untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka perlu diuraikan.

1. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

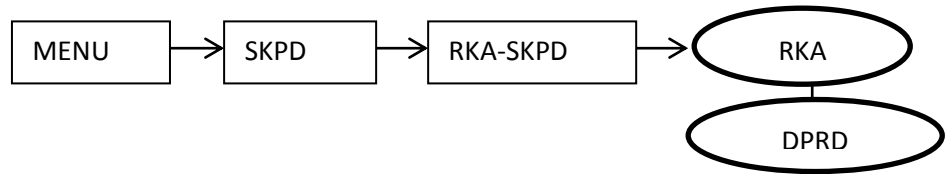
Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban.

Berikut adalah flowchart sederhana berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD).



a. Bagian Anggaran

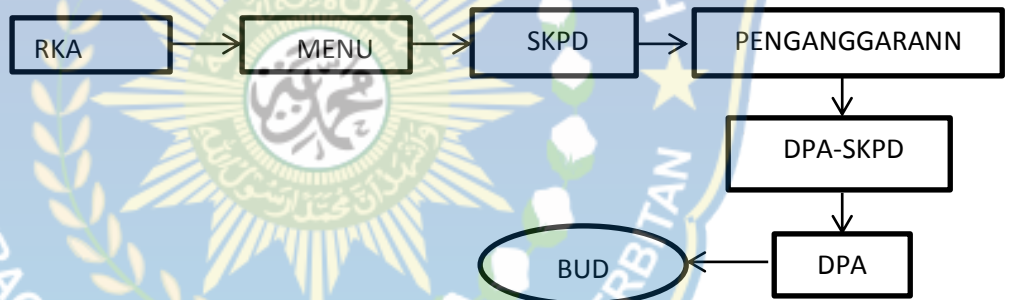
1) Rencana Kerja Anggaran (RKA)



Gambar 4.2 Alur Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dari gambar diatas dapat di deskripsikan bahwa alur dari rencana kerja anggaran (RKA) yaitu dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat rencana anggranya, lalu masing-masing rencana anggran (RKA) tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaporkan dan dibawah ke DPRD untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah.

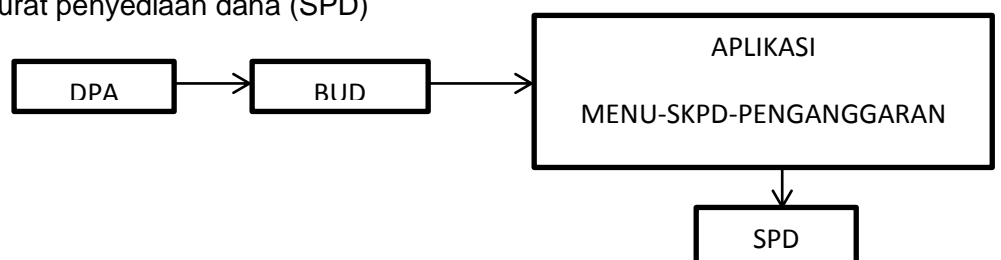
2) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)



Gambar 4.3 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa proses pelaksanaan anggaran yaitu dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, lalu menyampaikan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) ke bagian bendahara umum daerah (BUD).

3) Surat penyediaan dana (SPD)



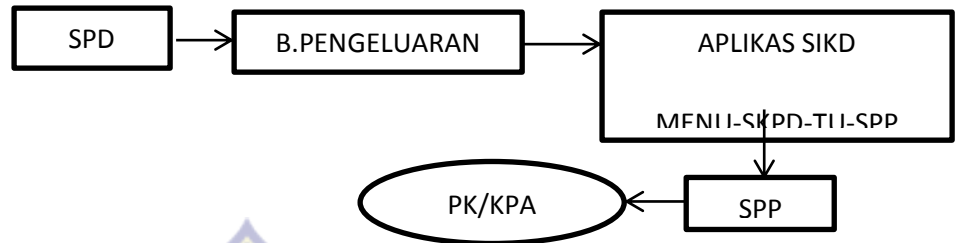
Gambar 4.4 Alur Surat Penyediaan Dana (SPD)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses dari surat penyediaan dana (SPD) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menyampaikan rencana anggarannya kepada bendahara umum daerah (BUD), keudian kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan DPA SKPD dan anggaran kas pemerintah daerah serta permintaan SPD dari SKPD. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotoritas dan ditanda tangani oleh PPKD, Setelah pejabat pembuat komitmen daerah (PPKD) megotorisasi rancanagn SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada pengguna anggaran, kumudian SPD diterbitkan dalam rangkap dua, yakni dokumen pertama diserahkan kepada pengguna anggaran yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembuatan SPP, kedua dokumen dibuat sebagai arsip oleh PPKD.



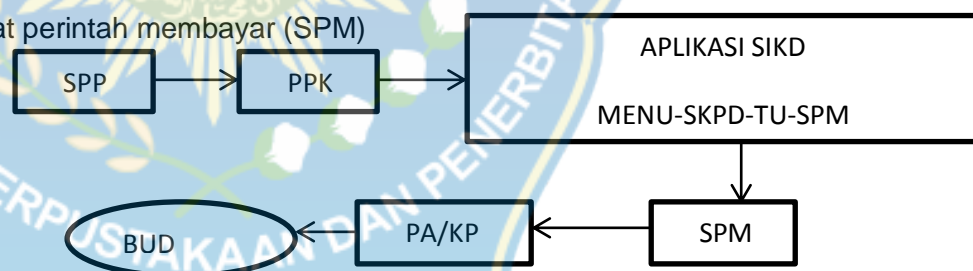
4) Bagian penatausahaan

a) Surat permintaan pembayaran (SPP)

**Gambar 4.5 Alur Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**

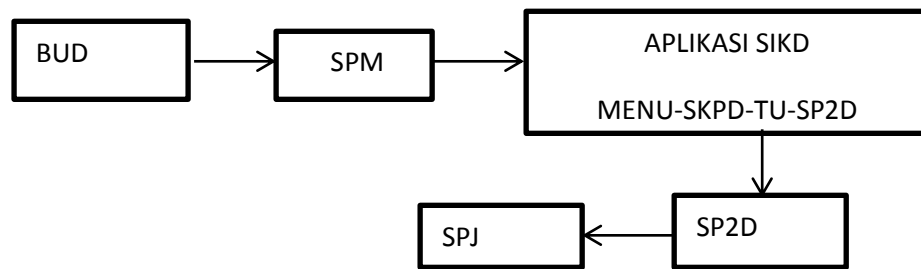
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses dari surat permintaaan pembayaran (SPP) yaitu dokumen SPD kemudian akan diserahkan kepada bendahara umum daerah (BUD) kepada stiap SKPD untuk digunakan sebagai dasar pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), kepala SKPD kemudian akan menyerahkan dokumen SPD kepada bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD dalam rangka pembuatan dokumen SPP, SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran dan diajukan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui pejabat pembuat komitmen (PPK-SKPD). Berdasarkan SPP yang akan diajukan oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD. Kemudian akan menguji dan memverifikasi SPP.

b) Surat perintah membayar (SPM)

**Gambar 4.6 Alur Surat Perintah Membayar (SPM)**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur dari surat perintah membayar (SPM) yaitu dimulai dari petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan menandatangani tanda terima SPP, selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) lalu kemudian PPK penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP dengan cara memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP, Setelah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen maka PPK menerbitkan SPM. Setelah itu kemudian dibawah ke bendahara umum daerah (BUD).

c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



Gambar 4.7 Alur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur dari surat perintah pencairandana (SPD2) yaitu dimulai dari bendahara umum daerah (BUD) melakukan audit atas kebenaran dan kelengkapan dari surat perintah membayar (SPM), jika BUD menyatakan bahwa dokumen itu sudah lengkap maka bendahara umum daerah (BUD) akan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang sudah disahkan telah berhasil ditanda tangani dan distempel oleh BUD.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan Kesuksesan pada Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

a. Kualitas Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah dalam rangka menunjang kemampuan dan profesionalisme. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu menunjang kualitas informasi keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya tidak lepas dari kinerja sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang yang dia tekuni. Begitupun dalam hal para pengguna sistem informasi keuangan daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus, dimana para pengguna harus dapat menjalankan atau menggunakan komputer.

Dalam proses optimalisasi penggunaan SIKD erat kaitanya dengan ketersediaan SDM dalam mendukung program aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Namun untuk menunjang optimalnya penggunaan sistem ini sumber daya manusia akan bisa mengoptimalkan penggunaan SIKD tanpa adanya keahlian dan dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengolah sistem ini. Maka dari itu peneliti mengajukan

pertayaan dengan melakukan wawancara kepada tiga informan yaitu Ibu Mukmin Ibrahim, Bapak Permadi Hasan dan ibu

Ibu Mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

"Iya..memang para pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi, dalam artian dia tidak hanya sebatas bisa menjalankan computer saja. Karena ini kan sistem dimana tidak semua orang bisa menjalankannya harus dia yang paham dan mengerti dengan sistem ini. Dan terkait dengan pelatihan dalam hal pengelolaan SIKD itu, para staff atau pengguna SIKD itu selalu diikutkan berbagai pelatihan terkait SIKD, karena dari pelatihan itu kan disana mereka diajari tentang cara penggunaan SIKD dengan baik dan benar.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Mukmin Ibrahim di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 agustus 2019 bahwa pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal penggunaan SIKD, tidak hanya itu dia juga harus bisa mengoperasikan komputer. Pembekalan atau pemberian pelatihan bagi para pengguna SIKD juga sangat penting karena melalui pelatihan itu, para pengguna diajarkan bagaimana mengoperasikan sistem SIKD dengan baik dan benar.

Penjelasan dari Ibu Mukmin Ibrahim diperkuat oleh Bapak Permadi Hasan yang mengatakan bahwa :

"Sudah pasti harus memiliki keahlian dalam hal computer, karena kalau kita menggunakan aplikasi SIKD kita harus mengetahui bagaimana untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi untuk itu harus menggunakan keahlian khusus dibidang itu. Tidak semua orang bisa menjalankan computer. Semua pengguna atau operator SIKD didalam mengoperasikan sistem ini maka sebelumnya mereka harus melakukan pelatihan-pelatihan terkait sistem ini, dan beberapa bulan lalu kami para pengguna SIKD kembali ikut pelatihan terkait sistem ini, baik itu pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah sendiri, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu kita harus mengikuti pelatihanya. Karena dari pelatihan itu kita bisa mengetahui apa yang sebelumnya belum dimengerti.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Permadi Hasan di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa pengguna SIKD harus memiliki keahlian khusus dia tidak hanya berlandaskan pandai dalam hal mengoperasikan komputer namun dia juga harus pandai dan mengerti terkait SIKD ini. Pemberian pelatihan pada para pengguna SIKD sangat penting untuk dilakukan karena dari pelatihan tersebut dia biasa mengetahui apa yang selama ini belum dia ketahui.

Sedangkan menurut Ibu Nurhama

“Iya jadi dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah ini memang harus memiliki keahlian khusus .jadi,mereka semua sebelumnya harus dilatih dan diberikan bekal untuk mengoperasikan sistem ini. Dan juga para pengguna SIKD di instansi ini juga dari awal penggunaan sistem sudah ikut.melakukan berbagai pelatihan terkait sistem ini,jadi mereka sudah cukup tahu dan paham terkait sistem ini.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Hairuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa pengguna SIKD perlu memiliki keahlian khusus tidak hanya sekedar pandai dalam hal computer saja,namun mereka juga harus dibekali dengan berbagai pelatihan dalam hal mengoperasikan sistem ini.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengguna SIKD tidak hanya sebatas seseorang bisa menjalankan atau mengoperasikan computer, namun hal ini dia juga paham dan mengerti terkait site mini karena tidak semua orang yang bisa menjalankan computer bisa mengoperasikan sistem SIKD ini. Pemberian pelatihan dan pembekalan terkait mengoperasikan SIKD juga sangat penting diikuti dan diberikan bagi para pengguna SIKD dan para pengguna sistem ini pada instansi ini bisa dikatakan sudah cukup paham terkait sistem karena memang dari awal adanya sistem sudah melakukan berbagai pelatihan terkait penggunaan SIKD ini,karena dari sanalah para pengguna bisa lebih mengetahui dan lebih memahami lagi terkait sistem tersebut.

b. Perangkat Computer

Sistem informasi merupakan salah satu hal penting dalam membantu perkembangan suatu organisasi. Sistem informasi keuangan daerah merupakan sebuah sistem informasi berbasis computer yang digunakan oleh suatu instansi pemerintahan untuk memberikan informasi terkait keunagan daerah kepada publik. Salah satu komponen utama sitem informasi dapat berjalan dengan baik adalah perangkat computer

Perangkat computer sangat besar peranannya terhadap optimalnya penggunaan SIKD. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu ibu Mukmin Ibrahim, bapak permadi Hasan, dan juga ibu nurhama

Ibu mukmin Ibrahim mengatakan bahwa;

“oh...kalau mengenai perangkat-perangkat menurut saya sudah cukup baik yang telah disiapkan oleh instansi karena semua fasilitas perangkat sudah sanagat layak digunakan oleh para pengguna dalam mendukung kerja sistem SIKD ini.yach seperti computer ini yang setiap staff yang memakai sitem itu disediakan satu computer satu orang jadi kita tidak perlu lagi ganti-gantian menggunakan computer karena sudah disiapkan masing-masing. Ini juga seperti tempat kerja ini. Setiap orang itu sudah diberikan meja masing-masing untuk bekerja, jadi kita disini itu bekerja ditempat yang telah disediakan.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Mukmin Ibrahim di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi dapat dikatakan layak dipakai dan sudah cukup baik dalam menompang kerja pada sistem.

Penjelasan dari ibu Mukmin Ibrahim diperkuat dengan penjelasan dari bapak Permadi Hasan yang mengatakan bahwa;

„Ahh...sampe saat ini semua perangkat computer yang sisiapkan oleh pemerintah daerah khususnya badan pengelola keuangan itu bisa dikatakan sudah cukup baik menompang kerja SKID ini. Kalau ditanyakan terkait layak tidaknya digunakan itu pastinya saya mengatakan sangat layak sekali digunakan dalam mendukung kerja pada sistem. Karena semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah itu sudah bisa mengakses semua dengan baik sistem informasi keuangan daerah yang kita gunakan sekarang ini.

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Permadi hasan yang dilakukan pada tanggal 16 agustus 2019 yaitu bahwa semua perangkat computer yang disiapkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Karena apa yang telah disiapkan oleh instansi khususnya di BPKD sudah cukup menopang sistem kerja sistem.

Sedangkan menurut ibu nurhama mengatakan bahwa :

“itu sudah pasti.alhamdulillah pemerintah enrekang sudah cukup memberikan fasilitas yang sangat baik bagi para staf pegawai disini. Begitupun halnya perangkat computer sudah cukup baik dan layak sekali digunakan para pengguna SIKD. Kebetulan di sini itu para pengguna SIKD sudah difasilitasi computer setiap orangnya.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu nurhama diatas dalam wawancara yang dilakukan peenliti pada 19 Agustus 2019 bahwa perangkat komputer yang yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup baik.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi bpkd daerah sudah cukup baik memberikan fasilitas pada perangkat computer yang dibutuhkan terkait dalam hal kerja sistem SIKD, karena apa yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup menopang dengan baik kerja pada sistem tersebut.

c. Jaringan internet

Jaringan computer (interconnection networking) adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat computer dari berbagai macam tipe atau jenis secara global dan terbuka. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar computer.

Adapun manfaat jaringan internet menurut haryanto, E.V, 2007. Yogyakarta, Yaitu;

- a. Jaringan internet memungkinkan seseorang untuk mengakses file yang dimilikinya atau file orang lain yang telah diizinkan untuk diakses dimanapun dan kapanpun.
- b. Jaringan memungkinkan proses pengiriman data berlangsung cepat dan efisien
- c. Jaringan memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang lain di berbagai Negara dengan komunikasi melalui via teks,gambar, audio, dan video secara real time.

Tabel 4.2 jaringan internet
Sumber : staff BPKD Tahun : 2018

No	Pengguna	Nama jaringan
1	Umum	Telkomsel
2	SIKD	Ikon*

Jaringan internet adalah pemegang kendali dari proses kerja dari sistem SIKD dimana salah satu fungsi jaringan yaitu memungkinkan pengiriman data inilah yang menjadi salah satu penunjang optimal tidaknya penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu ibu mukmin Ibrahim, bapak permadi hasan dan juga ibu nurhama.

Ibu Mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

“kalau soal jaringan internet itu bisa dikatakan sudah cukup baik tapi terkadang juga kita masih memiliki hambatan sedikit pada jaringan yang secara otomatis juga menghambat kerja kita, jadi tergantung jaringan, tapi Alhamdulillah jaringan itu kalau bermasalah tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu mukmin Ibrahim di atas yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa jaringan internet sudah bisa dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung proses penginputan pada SIKD. Namun terkadang juga mengalami gangguan yang membuat terhambatnya proses penginputan.

Penjelasan ibu mukmin Ibrahim diperkuat oleh bapak permadi hasan yang mengatakan bahwa :

“sampai saat ini Alhamdulillah jaringan sangat mendukung sekali dan cukup baik dalam mengakses. Namun terkadang juga ada masalah, tidak selamanya bagus jaringan karena jaringan itu bukan yang nyata yang kita lihat yang bisa kita perbaiki seperti perangkat computer. Ini persoalan jaringan seperti ini terkadang juga lambat, namun hal itu tidak terlalu lama dan kita sebagai pengguna bisa melanjutkan kembali proses penginputan. Jadi kalau ditanya soal apakah jaringan sudah cukup baik mendukung proses kerja SIKD pasti tentunya iaa..”

Makna dari keterangan bapak permadi hasan di atas dalam wawancara pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa jaringan internet sudah cukup baik mendukung proses penginputan pada SIKD. Walaupun ada sedikit kendala namun tidak terlalu berpengaruh pada pengguna karena situasi jaringan yang cepat kembali normal lagi.

Sedangkan menurut Ibu Nurhama mengatakan bahwa :

“iya, sampe sekarang Alhamdulillah jaringan itu sudah sangat bagus khususnya bagi para pengguna SIKD dalam melakukan penginputan, walaupun terkadang jaringan ini pasti ada aja masalahnya. Apalagi kalau yang menggunakan itu sudah melebihi kapasitas penggunaanya itu terkadang cukup lambat dalam mengakses sistem SIKD ini.

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu nurhama diatas dalam wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa jaringan internet dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung proses kerja SIKD. Walaupun terkadang lambat namun tidak terlalu menghambat proses kerja pada SIKD.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa jaringan internet pada instansi badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang khususnya pada penggunaan SIKD dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung optimalnya penggunaan SIKD, walaupun terkadang terjadi kelambatan dalam hal mengakses namun tidak terlalu berpengaruh karena hal tersebut terlalu lama terjadi dan bisa kembali normal lagi.

d. Keamanan Sistem

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi, walau terkadang masih seringkali kurang mendapat perhatian bagi para pengguna dan pengelola sistem informasi. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah lembaga pemerintahan. Sangat pentingnya sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu.

Keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Ancaman paling signifikan terhadap keamanan dari sistem computer pada saat ini bukan berupa ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga non fisik, yaitu intruders, biasa dikenal dengan “hacker/crackers” salah satu bentuk keamanan sistem yaitu menerapkan penggunaan password bagi setiap pengguna sistem, password akan dirahasiakan bagi mereka yang tidak diijinkan untuk mengakses. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan yaitu ibu mukmin Ibrahim, permadi hasan, dan juga ibu nurahma

Ibu mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

“iya, setiap pengguna sistem mempunyai password tersendiri.

Masing-masing kaa ada bagian-bagian yang telah ditentukan

untuk itu dia input atau dia kerjakan disistem itu. Jadi kan biasanya juga ada yang komputernya bermasalah dan dia ingin menginput sesuatu, jadi biasanya dia pake computer lain lagi. Supaya aman setiap pengguna itu memang diwajibkan untuk memiliki password tersendiri.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu mukmin Ibrahim di atas yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa setiap pengguna atau pemakai SIKD masing-masing mempunyai password tersendiri untuk mengakses sistem, agar data-data yang ada pada sistem tetap aman.

Penjelasan dari ibu mukmin Ibrahim di perkuat oleh bapak permadi hasan yang mengatakan bahwa :

“semua pengguna SIKD itu memiliki password tersendiri. Dalam artian para pengguna SIKD atau yang menginput data pada SIKD itu mempunyai password tersendiri untuk membuka sistem. Karena dia yang mempunyai tanggung jawab, misalnya di bidang anggaran, dia yang menginput terkait semua tentang anggaran itu harus punya password tersendiri tentang masalah penginputan anggaran. Nah, dia tidak bisa sembarang orang yang menginput. Artinya kalau orang anggaran harus orang anggaran yang bertanggung jawab, kalau di bidang akuntansi itu masalah pencairan tidak mungkin orang anggaran yang akan mencairkan atau memproses pencairan. Makanya dia harus memiliki password tersendiri dalam hal sistem ini. Dan yang paling penting dari diterapkannya penggunaan password bagin setiap pengguna sistem agar keamanan data-data itu tetap terjaga, namun selain dari pengguna itu sendiri yang mengetahui passwordnya ada pihak juga yang harus tahu karena misalkan dia terkendala datang maka pihak yang mengetahui passwordnya itu bisa membantu dulu dalam menginput data.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak permadi hasan di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa setiap pengguna atau pemakai SIKD itu memiliki password tersendiri untuk megakses sistem, karena setiap pemakai tanggung jawabnya itu berbeda, jadi salah satu alternative agar data-data para pemakai SIKD itu aman maka setiap pengguna SIKD itu wajib memiliki password tersendiri untuk membuka sistem. Namun selain dari pengguna ini ada satu pihak yang mengetahui password tersebut agar nantinya ketika ada hambatan ada yang bisa turut membantu dalam penginputan data.

Sedangkan menurut ibu nurhama mengatakan bahwa :

“iaa pasti itu, jadi ada level-level tertentu dalam hal penggunaan sistem ini. Jadi setiap user atau pengguna SIKD itu memiliki masing-masing password untuk membuka sistem. Kenapa? Karena setiap pengguna kan tugasnya beda-beda jadi untuk meminimalisir agar kesalahan kerja untuk para pengguna itu dengan diterapkannya pengguna password untuk masing-masing pengguna sistem.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu nurhama diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa para pengguna SIKD itu masing-masing memiliki password tersendiri untuk membuka sistem, karena dengan diberlakukannya atau diterapkannya pengguna password bagi para pengguna SIKD maka dapat meminimalisir kesalahan kerja yang mungkin bisa saja terjadi bagi para pengguna SIKD.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada instansi pemerintahan khususnya pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang. Terkait pada pengguna SIKD. Para pengguna atau pemakai sistem sudah memiliki masing-masing password untuk membuka sistem dan password tersebut juga diketahui oleh pihak terpercaya yang bisa membantu pengguna untuk menginput data apabila pengguna tersebut sedang sibuk atau tidak datang, karena dengan adanay penggunaan password ini bagi para pengguna maka dapat mencegah hal-hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi pada sistem SIKD. Misalnya dengan diterapkannya penggunaan password bagi setiap pengguna SIKD maka dapat meminimalisir kesalahan kerja yang mungkin bisa saja terjadi pada kalangan para pengguna dan juga yang paling sangat penting dampak yang ditimbulkannya dari penggunaan paswordnya yaitu terkait keamanan data-data yang ada pada sistem SIKD tersebut.

e. Akses informasi

Setiap badan public mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang luas. Lingkup badan public dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislative, serta penyelenggaraan Negara lainnya yang mendapatkan dan belanja Negara (APBN) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) dan mencakup pula organisasi non pemerintahan, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum, seperti lembaga swadaya masyarakat.

Sesuai dengan yang diamanat dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 setiap badan public menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional. Keberadaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public sangat penting sebagai landasan hokum yang berkaitan dengan. :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2. Kewajiban badan public menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas
4. Kewajiban badan public untuk membebani sistem dokumentasi dan pelayanan informasi

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses informasi terhadap publik, diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan erorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu ibu mukmin Ibrahim, permadi hasan, dan juga ibu nurhama.

Ibu mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

“ semua orang boleh mengakses informasi keuangan ini. Karena memang tujuan dari dibuatnya sistem ini itu supaya pemerintah lebih transparansi lagi terkait pengelolaan keuangan daerah. Tapi dia hanya bisa sebatas melihat saja, tidak mempunyai hak untuk mengubah atau apapun itu. Intinya Cuma sebatas melihat saja.

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu mukmin ibrahim di atas wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa akses informasi keuangan daerah yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh semua kalangan, namun dalam hal ini masyarakat atau public hanya sekedar cukup melihat saja informasi keuangan yang disajikan tanpa bisa mengubah atau apapun itu.

Penjelasan dari ibu mukmin Ibrahim diperkuat oleh bapak permadi hasan yang mengatakan bahwa :

“kalau persoalan informasi semua lapisan masyarakat, semua public bisa mengakses. Tetapi dia hanya bisa melihat dari sisi laporan hasil keuangan daerah. Dia tidak bisa merubah, menambah dan mengurangi, artinya dia sebatas hanya bisa melihat saja.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak permadi hasan diatas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah, namun tidak lebih dari itu, dalam artian masyarakat cukup hanya melihat saja informasi keuangan daerah yang telah di sajikan tanpa memiliki wewenang untuk merubah data-data yang sudah ada.

Sedangkan menurut ibu nurhama mengatakan bahwa ;

“Sebenarnya dari segi penganggaran itu semua bisa mengakses, tapi kan dalam hal penginputan data itu harus orang-orang terkait atau para pengguna SIKD yang boleh melakukannya. Jadi untuk ke public itu mereka hanya sebatas mengamati dan melihat saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah ataupun mengganti data tersebut. Karena yang memiliki wewenang itu hanya orang-orang disini yaitu para pemakai SIKD”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu nurhama diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa semua bisa mengakses, namun tidak dapat mengubah ataupun mengganti data-data yang telah disajikan karena yang mempunyai wewenang untuk mengubah yaitu hanya bagi para pengguna SIKD saja. Jadi untuk publik dia hanya sekedar melihat saja hasil informasi keuangan daerah yang telah disajikan oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa semua kalangan atau lapisan masyarakat sangat bebas untuk bisa mengakses informasi keuangan daerah yang telah disajikan dan diposting oleh pemerintah terkait, karena memang tujuan dari diterapkannya penggunaan SIKD yaitu agar pemerintah lebih transparansi lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Namun kalangan masyarakat luas hanya cukup bisa melihat hasil dari informasi keuangan saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah, menambah, ataupun mengurangi data informasi tersebut. Karena yang bisa melakukan hal tersebut yaitu hanya para pengguna dan pemakai SIKD saja yang bisa melakukannya.

f. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimanakan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintahan) secara keseluruhan SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain (permenpan No. PER/21/M-PAN/11/2008)

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2. SOP membantu staff menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan sehari-hari.
3. Meningkatkan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari
8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.

Dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam bekerja, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan yaitu Ibu Mukmin Ibrahim, Bapak Permadi Hasan dan juga Ibu Nurhama.

Ibu Mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

“Iyaa, kita disini it bekerja dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan terkait SIKD ini. Karena kedua hal itu adalah acuan utama kami dalam bekerja menggunakan sistem ini.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Mukmin Ibrahim di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa yang menjadi hal utama atau acuan para pengguna SIKD dalam bekerja menggunakan sistem yaitu dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Penjelasan dari ibu Mukmin Ibrahim diperkuat oleh bapak Permadi Hasan yang mengatakan bahwa :

“Iya sudah sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah terkait SIKD yang telah disampaikan oleh menteri keuangan, itu sudah sesuai dengan yang kita laksanakan isin. Karena memang yang menjadi pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Badan Pengelola Keuangan Daerah ini yaitu SOP dan juga peraturan menteri keuangan.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Permadi Hasan di atas dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa standarisasi dan pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yaitu

denagn berlandaskan pada SOP yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan juga peraturan menteri keuangan terkait SIKD.

Sedangkan menurut ibu Nurhama mengatakan bahwa :

“Iyaa, kami disini sebagai pengguna dan pemakai SIKD itu dalam bekerja sudah sesuai dengan standar operasinal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk sementara ini kami dari sistem informasi keuangan daerah kabupaten enrekang ini sudah diakui, jadi kita disini itu dalam hal penggunaan SIKD ini itu selalu berpedoman pada peraturan pemeintah terkait dalam hal hal penggunaan SIKD ini.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak permadi hasan diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa yang menjadi informasi keuangan daerah (SIKD) yaitu dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan-peraturan menteri keuangan terkait SIKD.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada kabupaten enrekang khususnya di badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dalam menggunakan atau menjalankan sistem selalu mengaju pada SOP dan juga peraturan pemerintah.

3. Upaya-upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD

Pada pemerintahan kabupaten enrekang khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Mukmin Ibrahim, Bapak Pemadi Hasan dan juga Ibu Nurhama.

Ibu mukmin Ibrahim mengatakan bahwa :

“setiap apa yah, hampir setiap tahun kan ada perubahan terkait sistem, jadi supaya lebih optimal itu kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu mukmin Ibrahim di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Agustus 2019 bahwa salah satu upaya agar penggunaan siste informasi keuangan

daerah (SIKD) dapat lebih optimal yaitu dengan selalu ikut menyesuaikan perubahan-perubahan pada sistem yang terjadi tiap tahunnya.

Penjelasan dari ibu mukmin Ibrahim diperkuat dengan penjelasan dari bapak permadi hasan yang mengatakan bahwa :

“nah masalah upaya-upaya yang dilakukan badan pengelola keuangan daerah ini hanya sebatas sebagaimana terkait jaringan itu bisa lebih optimal lagi dalam artian jaringan tidak menghambat lagi dalam hal pekerjaan terkait SIKD ini karena salah satu penunjang optimalnya penggunaan SKID yaitu soal jaringan. Jadi, disini kita perlu lagi bagaimana caranya agar jaringan tidak lagi menjadi penghambat pada sistem ini, mungkin seperti itu.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak permadi hasan di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Agustus 2019 bahwa untuk membuat penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat lebih optimal lagi yaitu dengan dilakukannya perbaikan sistem jaringan, Karena salah satu penunjang utama SIKD yaitu factor jaringan, jadi, agar penggunaan SIKD dapat lebih optimal lagi yaitu dengan cara pengoptimalan kinerja jaringan.

Sedangkan menurut ibu nurhama mengatakan bahwa :

“Dalam hal mengoptimalkan penggunaan sistem ini, kami disini selalu membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna sistem SIKD ini untuk lebih mendalami lagi kerja sistem tersebut. Jadi, jika dia mengalami masalah terkait sistem dia lebih mudah untuk menyelesaikannya.

Makna dari keterangan yang diberikan oleh ibu nurhama diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Agustus 2019 bahwa salah satu langkah agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat lebih optimal lagi adalah dengan cara membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna SIKD agar dapat lebih mengetahui lagi secara lebih mendalam terkait sistem tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan pada pemerintahan kabupaten enrekang khususnya pada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk lebih

mengoptimalkan lagi penggunaan sistem yaitu dengan cara pengguna atau pemakai SIKD harus dapat menyesuaikan setiap perubahan yang terkait pada sistem tiap tahunnya, selain itu salah satu penunjang optimalnya penggunaan SIKD yaitu perbaikan sistem jaringan, agar jaringan tidak lagi menjadi salah satu penghambat kerja pada sistem. Dan juga pemberian bekal dan pelatihan terhadap para pengguna atau pemakai sistem agar lebih mengetahui lagi secara mendalam mengenai sistem SIKD adalah salah satu upaya agar penggunaan SIKD dapat lebih optimal lagi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

1. Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Kabupaten Enrekang khususnya di instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dikatakan penggunaannya sudah optimal Karena dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu Sumber daya manusia (SDM), Perangkat Komputer, Keamanan Sistem, Jaringan Internet, Akses Informasi, efisiensi Waktu, dan juga SOP.

2. Upaya - upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD

Adapun upaya –upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten enrekang khususnya pada badan pengelola keuangan daerah (bpkd) dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD yaitu:

- d. Selalu menyesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada sistem SIKD
- e. Memberikan Pelayanan jaringan yang optimal dalam mendukung proses kerja pada SIKD
- f. Melatih dan membekali para pengguna sistem SIKD agar lebih mengetahui secara lebih jelas lagi terkait sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan, penulis memberikan saranyang kiranya dapat bermanfaat dan menjadi cerminan dalam peneliti selanjutnya mengenai penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.

1. Untuk lebih mengoptimalkan lagi penggunaan pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diharapkan pemerintahan Kabupaten Enrekang khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pemberian kapasitas jaringan dapat di perbaiki lagi atau memperbesar jangkauan kapasitas jaringan lagi agar tidak terjadi kelambatan pada saat penginputan data-data ke dalam sistem.
2. Melatih dan membekali para pengguna sistem SIKD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang



DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, M.A.,Herawati, N.T dan Atmaja, A.t. 2014. ***Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, penerapan sistem informasi pengolahan keuangan daerah dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan pada bagian keuangan setda kabupaten buleleng jurnal akuntansi program S1***
- Fauzi, R.A. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Haryanto.,E.V.2012. *Jaringan Komputer*. Andi. Yogyakarta
- Iriani, S, Suyanto, M. dan Amborowato, A. 2014. ***Pengujian sistem informasi Pengolahan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan dengan menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut)***. Indonesian journal On Nertwork And Securyty. Vol. 3. No 2 (diakses 25 November 2017)
- Iivari, J. 2005. *An Empirical Test of the Model of Information System Success*.
Keuda.kemendagri.go.id/sipkd
- Muslihudin, M, dan Oktafianto. 2016. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Andi: Yogyakarta
- O'brien James A and George Marakas.2009. *Management Information System*.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 Dalam Rangka Mendukung Percepatan Penyampaian Informasi Informasi Keuangan Daerah.
- Pirade,D. Saleh, A.K. dan Amar, M.Y. 2013. ***Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Tana Toraja***
- Primasari, D. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kinerja pegawai. *Jurnal ilmu akuntansi*.

Rachim , AF,A.. 2015 **Barometer Keuangan Negara**. Andi: Yogyakarta

Wartini, N.N dan Murjana Yasa, I.G.W. 2016. **Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Jembrana**. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*

www.wikiapbn.org/sistem-informasi-keuangan-daerah/



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Dokumentasi

" Kegiatan wawancara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BKPD)
KABUPATEN ENREKANG







Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran Pedoman Wawancara

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

Pendidikan:

- a. Apakah pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
- b. Apakah pengguna SIKD tersebut dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengolah data pada SIKD ?
- c. Apakah semua perangkat komputer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah layak dan cukup menopang dengan baik cara SIKD ?
- d. Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ?
- e. Bagaimana dengan keamanan sistem, apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem ?
- f. Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi ?
- g. Apakah dengan adanya SIKD dapat mengefisienkan waktu dalam penyusunan keuangan daerah ?
- h. Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah sudah sesuai dengan standard operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
- i. Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan pengguna SIKD agar sesuai dengan standard operasional yang ditetapkan pemerintah?

- j. Apakah dengan dilakukanya upaya tersebut pengguna SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standard operasional yang ditetapkan pemerintah?



Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

**Transkrip wawancara tanggal 15 Agustus 2019 antara pewawancara
dengan informan**

Identitas informan

Nama informan : Mukmin Ibrahim

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Tempat wawancara : Kantor BPKD

Pewawancara	Hasil wawancara
Hanriani	Assalamualaikum wr.wb bu
Mukmin	Walaikumsalam. Ada apa ?
Hanriani	Maaf mengganggu sebelumnya bu, Ini saya yang beberapa minggu lalu sudah ajukan surat buat penelitian di kantor ini bu,
Mukmin	Ohiye,yang itu hari datang kesini
Hanriani	Iye bu, jadi ini pak mau lanjutkan lagi yang sempat tertunda itu hari
Mukmin	Ohiye silahkan
Hanriani	Jadi saya bisa mulai sekarang wawancaranya ?
Mukmin	Iaa silahkan
Hanriani	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (skid) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
Mukmin	Iaa, jadi dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan harus memiliki keahlian khusus jadi, mereka semua sebelumnya harus dilatih dan diberikan bekal untuk mengoperasikan sistem ini, dan juga para pengguna SIKD di instansi ini juga dari awal penggunaan sistem sudah ikut melakuakn berbagai pelatihan terkait sistem ini. Jadi mereka sudah cukup tahu dan paham terkait sistem ini
Hanriani	Berarti tidak hanya sekedar bisa menjalankan computer saja pak, tapi perlu juga diberikan pelatihan khusus dalam hal penggunaan sistem ini?
Mukmin	Itu sudah jelas dek.
Hanriani	Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah cukup menopang dengan baik kerja SIKD ?
Mukmin	Ooh iya pasti itu, Alhamdulillah pemerintah enrekang itu memberikan fasilitas yang sangat baik bagi para staff disini. Begitupun halnya perangkat computer sudah cukup baik dan layak sekali digunakan oleh para pengguna SIKD. Kebetulan disini itu para pengguna SIKD sudah difasilitasi computer setiap orangnya.
Hanriani	Oh berarti kalau terkait soal perangkat-perangkat computer itu sudah terfasilitasi yah bu ?
Mukmin	Iaa..sangat difasilitasi semua pekerja disini

Hanriani	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ?
Mukmin	Iya alhamdulillah jaringan itu sudah begitu bagus khususnya bagi para pengguna SIKD dalam melakukan penginputan. Walaupun terkadang jaringan ini pasti ada saja masalahnya , apa lagi itu sudah melebihi kapasitas penggunaanya itu terkadang cukup lambat dalam mengakses sistem SIKD ini
Hanriani	Lalu bagaimana untuk mengatasi apabila hal itu terjadi ?
Mukmin	Yahh, kita hanya tunggu loading saja sampai dia bisa normal kembali. Karena jaringan kan kita tidak bisa prediksi kapan dia lancer dan tidaknya.
Hanriani	Bagaimana dengan keamanan sistem apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem ?
Mukmin	Iyaa, jadi ada level-level tertentu dalam hal penggunaan sistem ini, jadi setiap user atau pengguna SIKD itu memiliki masing-masing password untuk membuka sistem. Kenapa ? karena setiap pengguna kan tugasnya beda-beda jadi untuk meminimalisir agar kesalahan kerja untuk para pengguna itu dengan diterapkannya pengguna password untuk masing-masing pengguna sistem.
Hanriani	Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD ?
Mukmin	Sebenarnya dari segi sisi penganggaran itu semua bisa mengakses, tapi kan dalam hal penginputan, dalam hal pergantian-pergantian data itu harus orang-orang terkait atau para pengguna SIKD yang boleh melakukannya. Jadi untuk ke public itu mereka hanya sebatas mengamati dan melihat saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah ataupun mengganti data tersebut. Karena yang memiliki wewenang itu hanya orang-orang disini yaitu para pemakai SIKD
Hanriani	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah ini sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
Mukmin	Iyaa,kami disini sebagai pengguna dan pemakai SIKD itu dalam bekerja sudah sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi untuk sementara ini kami dari sistem informasi keuangan daerah kabupaten enrekang ini sudah diakui.jadi Alhamdulillah kabupaten enrekang setiap laporan-laporannya itu sudah semuanya link terhadap pemerintah pusat. Kita disini itu dalam hal penggunaan SIKD ini selalu berpedoman pada peraturan pemerintah terkait dalam hal penggunaan SIKD ini.
Hanriani	Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
Mukmin	Dalam hal mengoptimalkan penggunaan sistem ini, kami disini selalu membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna sistem SIKD ini untuk lebih mendalami lagi kerja sistem tersebut. Jadi, jika dia mengalami masalah terkait sistem dia lebih mudah untuk menyelesaikanya.

Hanriani	Apakah dengan dilakukanya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah ?
Mukmin	laa jelas, karena yang menjadi penunjang optimal tidaknya penggunaan sistem ini kan kita kembali lagi pada sumber daya manusianya atau pengguna sistem tersebut. Jadi jika penggunaanya lebih mengetahui sistem tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakanya terkait SIKD maka penggunaanya itu bakal lebih optimal lagi
Hanriani	Ohiya bu, mungkin wawancara dengan ibu sudah lebih dari cukup memberikan gambaran terkait penggunaan SIKD.
Mukmin	Iya dek, nanti kalau masih dibutuhkan ka,bisaji kesini lagi
Hanriani	Ohiye pak, makasih banyak kalau begitu saya permisi dulu bu Assalamualaikum
Mukmin	Walaikumsalam



Transkrip wawancara tanggal 16 Agustus 2019 antara pewawancara dengan informan

Identitas informan

Nama informan : Permadi Hasan

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Tempat wawancara : Kantor BPKD

pewawancara	Hasil wawancara
Hanriani	Assalamualaikum wr wb pak.
Permadi. H	Walaikum salam, silahkan duduk
Hanriani	Maaf mengganggu pak. Saya mahasiswa yang melakukan penelitian dikantor ini
Permadi H	ohiya, ada apa dek
Hanriani	Saya ingin wawancara terkait judulku pak
Permadi H	Ohiya mulaimi dek
Hanriani	Begini pak, apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
Permadi H	Iya sudah pasti harus memiliki keahlian khusus dalam hal computer pastinya.
Hanriani	Kenapa mesti pak seseorang harus memiliki keahlian khusus untuk bisa menggunakan SIKD ini?
Permadi H	Karena kalau kita menggunakan aplikasi SIKD ini kita harus mengetahui bagaimana untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, untuk itu harus menggunakan keahlian khusus diidang itu.
Hanriani	Apakah penggunaan SIKD harus dibekali untuk mengolah data pada SIKD?
Permadi H	Iya, Sudah Jelas Seperti Itu, Artinya Semua Pengguna Atau Operator SIKD didalam mengoperasikan sistem ini. Dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena memang dari awal adanya sistem ini kita disini pengguna sudah ikut pelatihan terkait sistem ini, dan 3 bulan sekali kita kembali ikut lagi pada pelatihan SIKD ini apakah itu pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah sendiri, apakah itu pelatihan dari pemerintah provinsi atau pusat itu kita harus mengikuti pelatihannya, karena dari pelatihan itu dia bakal mengetahui apa yang sebelumnya belum dia ketahui terkait sistem ini.
Hanriani	Berarti pak dalam hal ini setiap pengguna itu sangat penting untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penggunaan SIKD ini?
Permadi H	Oh iya,sudah jelas itu.
Hanriani	Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi apakah sudah layak dipakai dan sudah cukup menopang dengan baik cara kerja SIKD?
Permadi H	Aah, sampe saat ini semua perangkat computer yang disiapkan oleh

	pemerintah daerah khususnya badan pengelola keuangan itu, bisa dikatakan sudah cukup baik menopang kerja SIKD ini. Kalau ditanyakan terkait layak tidaknya digunakan sudah pasti sangat layak sekali. Karena semua perangkat computer sudah yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah itu sudah bisa mengakses semua dengan baik sistem informasi keuangan daerah yang kita gunakan sekarang ini.
Hanriani	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD?
Permadi H	Ahh..sampai saat ini Alhamdulillah jaringan sangat mendukung sekali dan cukup baik dalam mengakses. Namun terkadang juga ada masalah, tidak selamanya bagus jaringan Karena jaringan itu bukan yang nyata yang kita lihat yang bisa kita perbaiki seperti ini terkadang juga lambat, namun hal itu tidak terlalu lama dan kita sebagai penggunabisa melanjutkan kembali proses peninginputan . Jadi kalau ditanya soal apakah jaringan sudah cukup baik mendukung proses kerja SIKD pasti tentunya iaaa..
Hanriani	Bagaimana dengan keamanan sistem apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem?
Permadi H	Semua pengguna SIKD itu memiliki password tersendiri. dalam artian para pengguna SIKD atau yang menginput data pada SKID itu mempunyai password tersendiri untuk membuka sistem.
Hanriani	Kenapa setiap pengguna SIKD harus memiliki password tersendiri untuk membuka sistem?
Permadi H	Karena dia punya tanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab ahh...misalnya dibidang anggaran, dia yang menginput terkait semua tentang anggaran itu hanya punya password tersendiri tentang masalah penguinputan anggaran. Nah, dia tidak bisa sembarang orang yang menginput. Artinya kalau orang anggaran harus orang anggaran yang bertanggung jawab, kalau dibidang akuntansi itu masalah pencarian tidak mungkin orang anggran yang akan mencairkan atau memproses pencairan. Makanya dia harus memiliki password tersendiri dalam hal sistem ini. Dan yang paling penting dari diterapkannya penggunaan password bagi setiap pengguna sistem agar keamanan data-data itu tetap terjaga. Namun seklain dari pengguna itu sendiri yang mengetahui passwordnya ada pihak lain yang harus tahu karena misalkan dia terkendala datang maka pihak yang satu bisa mmbantu dulu dalam menginput data.
Hanriani	Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD?
Permadi H	Kalau persoalan informasi semua lapisan masyarakat, semua publik bisa mengakses. Tetapi dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa melihat dari sisi laporan hasil keuangan daerah. Dia tidak bisa merubah,menambah dan mengurangi. Artinya dia sebatas hanya bisa melihat saja.
Hanriani	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah sudah sesuai dengan standar oprasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
Permadi H	udah sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah terkait

	IKD yang telah disampaikan oleh menteri keuangan. Itu sudah sesuai dengan yang kita laksanakan disini. Karena memang yang menjadi pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah ini yaitu SOP dan juga peraturan menteri keuangan.
Hanriani	ya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Permadi H	Nah masalah upaya-upaya yang dilakukan oleh badan pengelola keuangan daerah ini hanya sebatas bagaimana terkait jaringan itu bisa lebih optimal lagi dalam hal pekerjaan terkait SIKD ini. Karena salah satu penunjang optimalnya penggunaan SIKD yaitu soal jaringan. Jadi, disini kita perlu lagi bagaimana caranya agar jaringan tidak lagi menjadi penghambat pada sistem ini. Mungkin seperti itu
Hanriani	Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai standar yang telah ditetapkan?
Permadi H	Ohh jelas, karena salah satu penghambat kerja pada SIKD itu Cuma terkait dengan jaringan saja, jadi jika jaringan sudah cukup baik dan menopang kerja sistem maka penggunaannya ini sudah sangat optimal lagi.
Hanriani	Ohiya pak, mungkin hasil wawancara saya dengan bapak ini sudah cukup memberikan gambaran terkait penggunaan SIKD ini. Terima kasih atas waktu yang telah bapak luangkan untuk saya
Permadi H	Sama-sama dek



Transaksi Wawancara Tanggal 19 Agustus 2019 Antara Pewawancara Dengan Informan

Identitas informan

Nama informan : Nurhama

Jabatan : Staff Anggaran

Tempat wawancara : Kantor BPKD

Pewawancara	Hasil Pewawancara
Hanriani	Assalamualaikum wr.wb. bu?
Nurhama	Walaikumsalam..ada apa ?
Hanriani	Maaf mengganggu sebelumnya bu, ini saya yang minggu lalu sudah ajukan surat buat penelitian dikantor ini bu, dan Alhamdulillah surat saya direspon dengan baik oleh bapak kepala BPKD dan sudah diberikan izin untuk meneliti disini.
Nurhama	Ohiye, kalau boleh tau apa judulta ?
Hanriani	Ohh Judulku Bu Yaitu Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Nurhama	Oh ie jadi yang mau diwawancarai itu bagian apa ?
Hanriani	Yang mau saya wawancarai itu bu, yang menggunakan sistem informasi keuangan daerah.
Nurhama	Ohiye, berarti cocok mi karena kebetulan saya staff anggaran disini yang memakai sistem dalam bentuk penginputan.
Hanriani	Ohiye bu, kalau boleh tau apa ada waktu buat saya lakukan wawancara.
Nurhama	Ohiye silahkan
Hanriani	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi?
Nurhama	Ehhh..sebenarnya iaa.. memang para pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi, dalam artian dia tidak hanya sebatas bisa menjalankan komputer saja. Karena ini kan sistem dimana tidak semua orang bisa menjalankannya harus dia yang paham dan mengerti dengan sistem ini, dan terkait dengan pelatihan dalam hal pengelolaan SIKD itu, para staff atau pengguna SIKD itu selalu diikutkan berbagai pelatihan terkait SIKD , karena dari pelatihan itu kan disana mereka diajari tentang cara penggunaan SIKD yang baik dan benar.
Hanriani	Apakah pengguna SIKD dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengelola data pada SIKD?
Nurhama	Iya, memang para staff disini itu selalu diikutkan pelatihan dalam hal SIKD ini.

Hanriani	Bu apakah memang perlu para staff yang menggunakan sistem ini ikut pelatihan?
nurhama	Ia perlu sekali, karena di pelatihan itu kan disana kita diajari bagaimana cara kerja terkait sistem ini.
Hanriani	Ooh iye bu, berarti wajib sekali bagi para pengguna ikut pelatihan setiap ada diadakan yah bu?
Nurhama	Iaa. Karena memang kan setiap ada pelatihan itu pasti kita disurati kesini supaya kita bisa ikut serta dalam kegiatan itu.
Hanriani	Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah cukup layak dan menopang dengan baik cara kerja SIKD?
Nurhama	Ooh, kalau mengenai perangkat-perangkat menurut saya sudah cukup baik yang telah disiapkan oleh instansi. Karena semuanya itu layak digunakan dalam mendukung kerja sistem.
Hanriani	Misalkan apa bu yang kita nilai kalau memang perangkat yang disediakan itu sudah cukup baik.
Nurhama	Yach seperti komputer ini yang setiap staff yang memakai sistem itu disediakan satu computer satu orang jadi kita tidak perlu lagi ganti-gantian menggunakan computer karena sudah disiapkan masing-masing
Hanriani	Ooh iye bu,
Nurhama	Ini juga seperti tempat kerja ini. Setiap orang itu sudah diberikan meja masing-masing untuk bekerja. Jadi kita disini itu bekerja ditempat yang telah disediakan.
Hanriani	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ini ?
Nurhama	Eehhh..kalau soal jaringan internet itu bisa dikatakan sudah cukup baik tapi terkadang juga kita masih memlii hambatan sedikit pada jaringan yang secara otomatis juga menghambat kerja kita. Jadi tergantung dari jaringan kalau jaringanya lagi bagus yach lancar, tapi kalau lagi jelek yah begitu kita terhambat lagi dalam penginputan. Tapi Alhamdulillah jaringan itu kalau bermasalah tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama.
Hanriani	Bagaimana dengan keamanan sistem, apakah setiap pengguna SIKD memiliki password tersendiri untuk membuka sistem ?
Nurhama	Iaa.. setiap pengguna dari sistem mempunyai password tersendiri
Hanriani	Kenapa bu setiap pengguna SIKD ini perlu memiliki password tersendiri untuk membuka sistem
Nurhama	Iaa.. karena masing-masing kana da bagian-bagian yang telah ditentukan untuk dia input atau kerjakan disistem itu. Jadi kan biasanya juga ada yang komputernya bermasalah dan dia ingin menginput sesuatu, jadi biasanya dia pake komputer lain lagi, jadi supaya data-datanya itu aman setiap pengguna itu memang diwajibkan untuk memiliki password tersendiri. Dan juga agar data-data dari setiap pengguna sistem itu bisa aman.

Hanriani	Bagaimana dengan akses informasi, siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD ?
Nurhama	Semua orang boleh mengakses informasi keuangan ini. Karena memang kan tujuan dari dibuatnya sistem ini itu supaya pemerintah lebih transparansi lagi terkait pengelolaan keuangan daerah.
Hanriani	Berarti sekarang bu siapa saja yang mau melihat terkait pengelolaan keuangan dan juga laporannya itu sudah bisa langsung diakses ?
Nurhama	Iaa. Tapi dia hanya bisa sebatas melihat saja tidak mempunyai hak untuk mengubah atau apapun itu, intinya Cuma sebatas melihat saja.
Hanriani	Apakah dengan adanya SIKD ini dapat mengefisienkan waktu dalam penyusunan keuangan daerah?
Nurhama	Iaa..kalau berbicara terkait efisien waktu itu ia sangat menghemat waktu sekali karena SIKD itu kan didalamnya sudah disiapkan bagian-bagiannya jadi tinggal kita langsung masukkan saja datanya, kita tidak perlu repot-repot lagi mencatat panjang lebar. Sistem ini itu sangat mempermudah dan membuat kita sebagai para pengguna itu sangat bisa lebih mudah dan cepat lagi dalam bekerja, karena setiap ada data yang mau diinput itu kita hanya langsung buka sistem dan memasukkan data sesuai dengan format yang telah disiapkan didalamnya.
Hanriani	Apakah penggunaan SIKD ni sudah sesuai dengan standar operasional atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah ?
Nurhama	Iaa..kita disini itu bekerja dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan terkait SIKD ini. Karena kedua hal itu adalah acuan utama kami dalam bekerja menggunakan sistem ini.
Hanriani	Upaya apa saja dilakukan instansi dalam hal mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ?
Nurhama	Eehhh.. setiap ada apa yah.. hampir setiap tahun kana da perubahan terkait sistem, jadi supaya lebih optimal itu kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu.
Hanriani	Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Nurhama	Ia kalau berbicara terkait optimal dan kesesuaian standar itu,kita disini bisa menjamin iya karena Alhamdulillah kita disini itu bekerja dengan berpatokan pada prosedur dan peraturan pemerintah.
Hanriani	Ooh iye bu, berarti kita disini bisa menjamin bahwa penggunaan SIKD itu sudah optimal ?
Nurhama	Iaa sudah cukup optimal penggunaannya.
Hanriani	Oj iya bu. Mungkin hasil wawancara saya dengan ibu ini sudah lebih dari cukup memberikan gambaran terkait penggunaan SIKD ini. Terima kasih atas waktu yang telah

	ibu luangkan untuk saya.
Nurhama	Oh iaa.. sama-sama. Nanti kalau masih ada lagi data yang kita butuhkan bisa kesini lagi.
Hanriani	Oh iya bu.. makasih banyak bu... kalau begitu saya permisi dulu bu, Assalamualaikum ..



RIWAYAT HIDUP



Nama : Hanriani
 Agama : Islam
 No. Hp : 085242031537
 Email : yniandriani572@gmail.com
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin II
 Daerah Asal : Sudu, Kec. Alla, Kab.Enrekang,
 Sulawesi Selatan.

Penulis dilahirkan di Sudu, Kec.Alla, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Januari 1996 dari Ayah bernama Doko dan Ibu Una Penulis merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 73 Sudu dari tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 ALLA dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 ALLA dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan penulis dapat menyelesaikan semester akhir pada tahun 2019.

Salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis harus menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang. Pengambilan judul ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa maupun pustakawan.